

Katalog BPS: 4401002.51

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI BALI 2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI BALI 2013



<http://bali.bps.go.id>

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI BALI 2013

ISSN : 2356-4296
Katalog BPS : 4401002.51
Nomor Publikasi : 51520.1403
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : ix + 49 halaman
Naskah : BPS Provinsi Bali

Tim Penyusun Naskah :

- ❖ Penanggung Jawab Umum : Panusunan Siregar
- ❖ Penanggung Jawab Teknis : Indra Susilo
- ❖ Koordinator : Budiyati Dwi Astuti
- ❖ Anggota : Dewa Ayu Eka Sumarningsih

Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial
Diterbitkan Oleh : BPS Provinsi Bali

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Kriminal 2013 ini merupakan publikasi keenam yang diterbitkan sejak tahun 2008 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum pengguna data. Sebagian besar data yang disajikan berupa *series* data mulai tahun 2004. Statistik Kriminal yang disajikan menggambarkan tindak pidana di Provinsi Bali tahun 2013 yang diperoleh dari hasil rekapitulasi laporan dan registrasi data Kepolisian Daerah Bali.

Meskipun publikasi ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya, disadari penyajian publikasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan publikasi mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan jerih payahnya, dengan ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Denpasar, September 2014
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Kepala,

PANUSUNAN SIREGAR
NIP. 19580314 198302 1 001



PANGAWEJANG STATISTIK

1. Membangun itu sulit, tetapi jauh lebih sulit melaksanakan pembangunan tanpa dukungan data statistik.
2. Data yang baik, akurat, bebas bias, dan terpercaya adalah data yang dikumpulkan berdasarkan metodologi statistik yang jelas dan benar.
3. Jangan pernah mengharapkan bahwa setiap data yang dikumpulkan itu, seratus persen benar sekalipun metodologi statistiknya sudah benar, karena data itu masih dikumpulkan oleh manusia.
4. BPS dalam setiap melakukan pengumpulan data, memiliki prinsip bahwa data yang dikumpulkan itu pasti mengandung kesalahan, tetapi dalam melaporkan dan mendiseminasikan datanya BPS tidak melakukan kebohongan.
5. Data bagaikan Kompas dan Pelita.

copyright@panusunan_siregar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PANCAWEJANG STATISTIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	3
1.3 Sumber Data	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II KONSEP DAN DEFINISI	7
2.1 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>)	7
2.2 Risiko Penduduk Terkena Tidak Pidana (<i>Crime Rate</i>)	8
2.3 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>)	8
2.4 Angka Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Cleareance Rate</i>)	9
2.5 Rasio Penduduk Polri	10
2.6 Persentase Tindak Pidana Menurut Jenis Tindak Pidana	11
2.7 Pelaku Tindak Pidana	14
BAB III ULASAN SINGKAT	17
3.1 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>)	17
3.2 Risiko Penduduk Terkena Tidak Pidana (<i>Crime Rate</i>)	21
3.3 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>)	33
3.4 Angka Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Cleareance Rate</i>)	25
3.5 Rasio Penduduk Polri	27
3.6 Persentase Tindak Pidana Menurut Jenis Tindak Pidana	29
3.7 Pelaku Tindak Pidana	31
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	39

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>), Provinsi Bali Tahun 2004-2013	19
Gambar 3.2	Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2012-2013	20
Gambar 3.3	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2012-2013	22
Gambar 3.4	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>), Provinsi Bali Tahun 2004-2013.....	24
Gambar 3.5	Angka Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2012-2013.....	25
Gambar 3.6	Rasio Penduduk terhadap Polri, Provinsi Bali Tahun 2012 - 2013	28
Gambar 3.7	Persentase Tindak Pidana, Provinsi Bali Tahun 2013.....	31
Gambar 3.8	Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2012-2013.....	32
Gambar 3.9	Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2013.....	33
Gambar 3.10	Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2013	34
Gambar 3.11	Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kewarganegaraan dan Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2013	35

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>), Provinsi Bali Tahun 2004-2013	41
Tabel 2.	Jumlah Tingkat Pidana yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>), Provinsi Bali Tahun 2004-2013	42
Tabel 3.	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 Penduduk, Provinsi Bali Tahun 2004-2013	43
Tabel 4.	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>), Provinsi Bali Tahun 2004-2013.....	44
Tabel 5.	Angka Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Clearence Rate</i>), Provinsi Bali Tahun 2004-2013	45
Tabel 6.	Jumlah Polri dan Rasio Penduduk per Polri, Provinsi Bali Tahun 2011-2013	46
Tabel 7.	Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar, Provinsi Bali Tahun 2010-2013	47
Tabel 8.	Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota dan Karakteristik Demografis, Provinsi Bali Tahun 2012-2013	48

<http://bali.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Bali secara terus menerus melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan pada dasarnya merupakan perubahan positif yang direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan ke arah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, hakekat pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.

Disadari atau tidak, pembangunan selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dapat membawa dampak negatif, misalnya meningkatnya angka tindak pidana, krisis lingkungan, dan sebagainya. Selain ukuran ekonomi dalam menentukan indikator kesejahteraan, peranan indikator sosial seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonominya semata, namun juga kebutuhan sosialnya, termasuk kebutuhan akan rasa aman.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel yang tidak terukur karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas,

termasuk aspek dan dimensi politik, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Di sisi lain data dan kajian mengenai kriminalitas sangat diperlukan dalam mendukung setiap tahapan pembangunan. Pembangunan merupakan proses jangka panjang dan memerlukan stabilitas yang mantap di berbagai sektor. Stabilitas sangat penting agar pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan. Salah satu komponen yang berpengaruh agar terbentuk stabilitas adalah terjaminnya keamanan di semua wilayah.

Keamanan berhubungan erat dengan tindak kriminal yang terjadi dalam kurun waktu dan batasan daerah tertentu. Tindak kriminal ini bisa dijadikan sebagai indikator awal untuk menilai kondisi dan situasi sosial di dalam sebuah komunitas. Dengan melihat perkembangan antar waktu maka tindak kriminal bisa dijadikan indikator yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan.

Pengembangan indikator kriminalitas sebagai indikator pembangunan semakin berkembang di masa mendatang seiring dengan berkembangnya pola-pola dan perilaku kejahatan. Modus kejahatan ternyata mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan jaman. Untuk itu sangat perlu disusun sebuah tolok ukur yang mampu memberikan gambaran antar waktu-wilayah tentang tindak kriminal yang berkembang dalam masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencoba menjembatani kebutuhan akan informasi kriminal dengan menyusun publikasi statistik kriminalitas. Indikator yang disajikan meliputi inti kriminalitas yang meliputi Jumlah Tindak Pidana (*Crime Total*), Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*), Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime clock*), Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearence Rate*), Rasio Penduduk per Polri, Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar, dan Pelaku Tindak Pidana menurut Karakteristik Demografi.

Publikasi ini merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya yang memberikan deskripsi umum tentang kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Dengan gambaran umum maka bisa diperoleh indikasi awal tentang pola kriminalitas. Hal ini penting karena terciptanya stabilitas pembangunan yang diawali dengan terciptanya keamanan harus diantisipasi sedini mungkin dengan membandingkan informasi yang tersedia. Jadi dalam hal ini gambaran data kriminalitas menjadi *starting point* perencanaan untuk menciptakan ketahanan wilayah pada masa yang akan datang.

1.2. Tujuan Penulisan

Penyusunan publikasi Statistik Kriminal Tahun 2013 ini dimaksudkan memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu penyusunan publikasi ini juga untuk memperoleh gambaran pola kriminalitas di Provinsi Bali, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan ketahanan dan stabilitas kemananan.

1.3. Sumber Data

Data tentang kriminalitas bersumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Bali khususnya dengan Bidang Pendataan dan Statistik (Dastik) yang melakukan rekapitulasi data kriminalitas.

Untuk melengkapi ulasan dan perbandingan antar tahun, maka publikasi ini juga menyajikan beberapa data kriminalitas yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disajikan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KONSEP DAN DEFINISI, meliputi Jumlah Tindak Pidana (*Crime Total*), Angka Tindak Pidana (*Crime Rate*), Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*), Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Cleareance Rate*), Rasio Penduduk per Polri, Persentase Tindak Kriminal Menurut Jenis Tindak Kriminal dan Pelaku Tindak Pidana menurut Karakteristik Demografi.

BAB III ULASAN SINGKAT, meliputi Jumlah Tindak Pidana (*Crime Total*), Angka Tindak Pidana (*Crime*

Rate), Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*), Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Cleareance Rate*), Rasio Penduduk per Polri, Persentase Tindak Kriminal Menurut Jenis Tindak Kriminal dan Pelaku Tindak Pidana menurut Karakteristik Demografi.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

<http://bali.bps.go.id>

<http://bali.bps.go.id>

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

Untuk menyamakan persepsi mengenai rincian-rincian dalam Publikasi Statistik Kriminal ini, maka dilakukan pembatasan melalui konsep dan definisi sebagai berikut:

2.1. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Statistik ini menggambarkan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Pada data Susenas angka ini merupakan potret penduduk terbanyak yang menjadi korban tindak kejahatan. Pada sumber data kepolisian, jumlah tindak pidana adalah peristiwa yang dilaporkan yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi.

Logikanya, baik data dari sumber Susenas maupun Polri akan menghasilkan jumlah tindak pidana yang relatif sama. Akan tetapi, kenyataannya angka Susenas akan cenderung lebih tinggi daripada angka Polri. Hal ini disebabkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda. Di sisi lain, kesadaran penduduk untuk melaporkan tindak pidana yang dialami masih relatif rendah walaupun secara umum sudah semakin meningkat. Akibatnya kemungkinan masih banyak kejadian yang tidak tercatat. Ini menjadi salah satu penyebab angka jumlah tindak pidana yang bersumber dari Polri lebih rendah.

Kegunaan indikator ini adalah untuk menggambarkan jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang

tidak tercatat atau "dark number". Semakin sedikit jumlah tindak pidana semakin baik kondisi keamanan di suatu wilayah. Hal ini logis karena semakin sedikit jumlah tindak pidana semakin terjamin keamanan di masyarakat.

2.2. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)

Angka ini mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana. Biasanya dinyatakan pada setiap 100.000 penduduk. Risiko penduduk terkena tindak pidana merupakan hasil bagi jumlah tindak pidana dengan jumlah penduduk. Secara sederhana dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana} = \frac{\text{Jumlah Tindak pidana pada tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk pada tahun } t} \times k$$

dimana:

k = konstanta, biasanya 100.000

Menurut sumber Susenas: jumlah tindak pidana = jumlah korban

Indikator ini mengindikasikan risiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk. Semakin kecil angka risiko penduduk terkena tindak pidana semakin baik karena berarti peluang penduduk terkena tindak pidana semakin kecil.

2.3. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)

Statistik ini mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain. Selang waktu

kejadian kriminal dinyatakan dalam waktu detik. Penghitungannya dirumuskan dengan:

$$\text{Selang waktu kejadian = } \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah tindak pidana pada tahun } t} \text{ (detik)}$$

Menurut sumber Susenas: jumlah tindak pidana = jumlah korban

Semakin besar nilai *crime clock* mengindikasikan bahwa kejadian tindak pidana semakin jarang terjadi. Sebaliknya semakin kecil nilai *crime clock* mengindikasikan bahwa kejadian tindak pidana semakin sering terjadi.

Bertambah lamanya selang waktu terjadinya tindak pidana menjadi salah satu sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2013.

Selang waktu terjadinya tindak pidana di Provinsi Bali pada tahun 2013 adalah 01°02'25". Hal ini berarti di Provinsi Bali pada tahun 2013 setiap 1 jam 2 menit 25 detik terjadi satu tindak pidana.

2.4. Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearence Rate*)

Statistik ini menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh Polri. Angka penyelesaian tindak pidana merupakan proporsi jumlah tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian pada kurun waktu tertentu. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:

- berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan;

- dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
- telah diselesaikan oleh Polri berdasarkan azas *Plichtmatigheid* (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum);
- kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi Polri;
- tersangka meninggal dunia;
- kasus kadaluwarsa;

Angka penyelesaian kasus tindak pidana dapat dihitung menggunakan rumus:

$\text{Angka penyelesaian tindak pidana} = \frac{\text{Jumlah tindak pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah tindak pidana pada tahun } t} \times 100\%$
--

Semakin besar angka penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh Polri.

2.5. Rasio Penduduk Polri

Statistik ini mengindikasikan beban seorang Polri dalam menjamin keamanan penduduk. Semakin besar rasio penduduk Polri, menunjukkan jaminan keamanan penduduk semakin baik.

Standar PBB, kuantitas Polri adalah satu personil Polri untuk 400 orang penduduk.

Rasio penduduk Polri dirumuskan:

$\text{Rasio Polri Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk pada tahun } t}{\text{Jumlah Personil Polri pada tahun } t}$

2.6. Persentase Tindak Pidana Menurut Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana, meliputi:

- Pencurian biasa adalah pencurian barang atau ternak bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya tanpa didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan terhadap orang/korban.
- Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai dan diikuti dengan pengrusakan.
- Pencurian kendaraan bermotor adalah pencurian jenis kendaraan bermotor baik kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat.
- Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu serta memudahkan/memberi kesempatan pelaku melarikan diri, atau jika tertangkap basah (kepergok) barang yang dicuri tetap ada di tangan pelaku.
- Pencurian kayu adalah pencurian kayu dengan sengaja di hutan tanpa memiliki surat ijin usaha baik hutan lindung ataupun hutan alam yang mengakibatkan kerusakan hutan.
- Penganiayaan ringan adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain yang tidak menimbulkan halangan bagi korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Penganiayaan berat adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain sampai dengan mengakibatkan korban luka/cacat atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-

hari dengan sempurna. Korbannya adalah orang yang dianiaya.

- Pembakaran adalah perbuatan yang dengan sengaja membakar (misalnya: rumah, hutan) yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang, jiwa/badan.
- Pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.
- Perkosaan adalah pemaksaan perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Kenakalan remaja adalah perbuatan remaja yang dengan sengaja mengakibatkan gangguan keamanan seperti: perkelahian antar sekolah/gang, minum-minuman, dan sebagainya.
- Uang palsu adalah perbuatan dengan sengaja membuat dan atau mengedarkan uang tiruan yang beredar di masyarakat.
- Narkotika adalah perbuatan menjual, menawarkan, menerima atau membagikan narkotik, sedang ia tahu bahwa narkotika itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkan.
- Penipuan adalah perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat atau dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.
- Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu secara sah sudah ada pada pelaku.

Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

- Permainan judi adalah perbuatan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta yang bersifat untung-untungan, artinya bila tidak menang, uang atau barang taruhan hilang.
- Lainnya adalah perbuatan-perbuatan pidana yang tidak termasuk dalam kategori di jenis pidana yang telah di sebutkan di atas, antara lain, misalnya: pengancaman, pemerasan, perkosaan terhadap laki-laki, korban akibat tabrak lari.

Berdasarkan jenis pidana yang dialami korban, tindak kriminal dikelompokkan menjadi dua:

- 1) Korban secara langsung menderita kerugian, baik badan, jiwa atau harta benda, seperti pembunuhan, penganiayaan, penculikan/perampasan kemerdekaan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian tanpa kekerasan, pembakaran, perusakan, penipuan, dan pemerkosaan. Dalam proses penyelidikan dan tindak lanjut aparat terhadap pelaporan kasus masyarakat akan diperoleh data kerugian ditemukan kembali.
- 2) Korban secara tidak langsung menderita kerugian baik badan, jiwa atau harta benda seperti perzinahan, narkoba, dan obat keras.

Berdasarkan skala wilayah penyebaran, tindak kriminal dibedakan menjadi tindak kriminal konvensional dan tindak kriminal transnasional.

- Tindak kriminal konvensional yang menonjol di Bali pada umumnya adalah permainan judi, pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, minuman keras, penggelapan, pencurian sepeda motor, penganiayaan biasa, narkoba, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penipuan.
- Tindak kriminal transnasional, seperti perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, perdagangan anak dan perempuan, terorisme dan pencucian uang.

2.7. Pelaku Tindak Pidana

- a. Pelaku tindak pidana adalah:
 - Orang yang melakukan tindak pidana.
 - Orang yang turut melakukan tindak pidana.
 - Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana.
 - Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana.
 - Orang yang membantu untuk melakukan tindak pidana.
- b. Klasifikasi pelaku tindak pidana menurut umur:
 - Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun dan belum kawin.
 - Dewasa adalah seseorang yang telah berusia 18 tahun atau lebih atau berusia kurang dari 18 tahun tetapi sudah berstatus kawin/cerai.
 - Umum adalah anak-anak dan dewasa.
- c. Tahanan
 - Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pidana yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

d. Kerugian

- Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

<http://bali.bps.go.id>

<http://bali.bps.go.id>

BAB III

ULASAN SINGKAT

3.1. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Pencapaian pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Bali secara umum menunjukkan hasil yang semakin menggembirakan. Salah satu indikasi kondisi ini adalah jumlah wisatawan manca negara yang datang langsung ke Bali terus meningkat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai aspek kehidupan yang kualitasnya cenderung menurun menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal, konflik vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Di sisi lain, berbagai permasalahan internal dan eksternal di lembaga pemangku keamanan masih mewarnai upaya menciptakan aparat keamanan yang profesional.

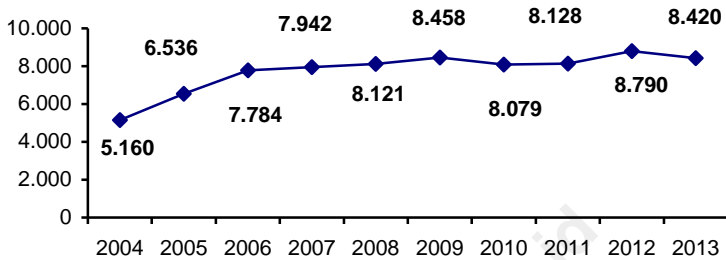
Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang aman dan damai upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, pengembangan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, serta peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya.

Rasa aman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa

aman masyarakat merupakan indikator negatif. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur rasa aman adalah angka kriminalitas total (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Berdasarkan catatan Polda Bali 2004-2013 jumlah tindak pidana di Provinsi Bali mengalami fluktuasi yang beragam (lihat Gambar 3.1). Secara umum polanya meningkat dari tahun 2004 dan mencapai puncaknya pada tahun 2009 (8.458 kasus). Kemudian pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi sebanyak 8.079 kasus. Sementara itu, pada tahun 2011 dan 2012 sedikit meningkat kembali menjadi 8.128 kasus dan 8.790 kasus. Peningkatan jumlah tindak pidana pada periode tahun 2011-2012 cukup tinggi yakni sebanyak 662 kasus atau 8,14 persen. Diduga faktor utama tingginya kenaikan angka jumlah tindak pidana ini adalah disparitas kualitas kehidupan masyarakat yang masih lebar serta kondisi negara yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti iklim investasi yang kondusif, kemiskinan, dan pengangguran. Kondisi yang cukup menggembirakan pada tahun 2013 adalah terjadi penurunan jumlah tindak pidana jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 370 kasus. Kenaikan jumlah pidana yang dilaporkan paling tinggi terjadi pada periode tahun 2004-2005 yakni sebanyak 1.376 kasus.

Gambar 3.1
Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*)
Provinsi Bali Tahun 2004-2013

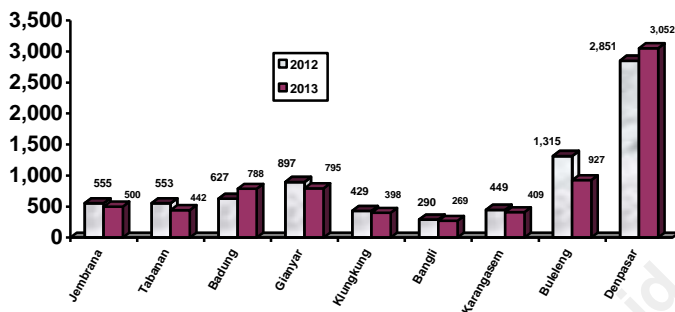


Sumber: Polda Bali, 2004-2013

Catatan: Kabupaten Badung Tahun 2004 data tidak tercatat/tersedia

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota maka pada periode 2012-2013 menunjukkan pola yang beragam (lihat Gambar 3.2). Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan jumlah tindak pidana yang dilaporkan adalah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Sementara itu, tujuh kabupaten lainnya mengalami penurunan.

Gambar 3.2
Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut
Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2012 - 2013



Sumber: Polda Bali, 2012-2013

Pada tahun 2012 dan 2013, Kota Denpasar tercatat sebagai kabupaten/kota di Bali yang memiliki tingkat tindak pidana yang tertinggi masing-masing sebanyak 2.851 dan 3.052 kasus. Pada tahun 2012, Kabupaten Buleleng, Gianyar, dan Badung adalah kabupaten yang memiliki tingkat tindak pidana tinggi. Pola yang sama juga terjadi pada tahun 2013. Sementara itu, Kabupaten Bangli, Klungkung dan Karangasem pada tahun 2012 dan 2013 tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah kasus pidana terendah. Jumlah kasus pidana yang terjadi pada Kabupaten Bangli, Klungkung dan Karangasem pada tahun 2013 masing-masing sebesar 269, 398 dan 409 kasus. Angka ini memperkuat hasil dari beberapa penelitian bahwa jumlah kasus pidana sejalan dengan kuantitas penduduk. Kabupaten Klungkung dan Bangli tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk yang relatif kecil.

Dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, tercatat hanya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang mengalami kenaikan jumlah tindak pidana cukup tinggi pada periode tahun 2012-2013. Hal ini sepatutnya menjadi perhatian

pihak yang berwenang mengapa hal ini bisa terjadi di kedua kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng merupakan dua kabupaten yang tercatat mengalami penurunan jumlah tindak pidana yang cukup banyak.

Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas atau jumlah tindak pidana akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan bidang-bidang lainnya. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminalitas, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, dan mencegah terjadinya konflik komunal merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi. Terciptanya iklim investasi yang mendukung pada gilirannya akan mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang.

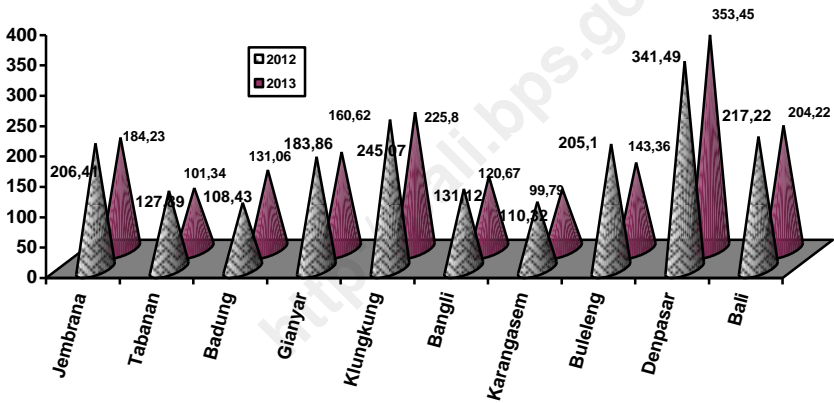
3.2. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)

Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Situasi dan perkembangan kejadian tindak pidana sangat berkaitan dengan tingkat kriminalitas. Gambaran situasi dan perkembangan kejadian tindak pidana yang kemungkinan akan dialami oleh masyarakat dapat dijelaskan dengan angka risiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Dalam ilmu statistik ada teori yang membahas tentang kemungkinan atau peluang terjadinya suatu kejadian. Teori ini bisa diaplikasikan dalam berbagai sektor dan sangat baik dipakai sebagai

indikator untuk mengambil kebijakan. Statistik kriminal menggunakan termin peluang ini untuk menilai kemungkinan penduduk terkena tindak pidana.

Kalau dilihat dalam dua tahun terakhir maka peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana di Provinsi Bali mengalami sedikit penurunan. Hal ini bisa dinilai dari *crime rate* yang menurun dari 217,22 di tahun 2012 menjadi 204,22 pada tahun 2013.

Gambar 3.3
Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2012 - 2013



Sumber: Polda Bali, 2012-2013

Pada Gambar 3.3. terlihat Kota Denpasar pada tahun 2012 dan 2013 memiliki peluang tertinggi adanya risiko penduduk terkena tindak pidana yaitu sebesar 341,49 dan 353,45 kasus per 100.000 penduduk. Sementara itu, selain Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem memiliki peluang terendah adanya risiko penduduk terkena tindak pidana yaitu sebesar 110,32 kasus per

100.000 penduduk pada tahun 2012, sementara pada tahun 2013 sebesar 99,79 kasus.

Masyarakat Kota Denpasar memiliki peluang tertinggi adanya risiko terkena tindak pidana. Nilai *Crime Rate* yang tinggi ini bisa dimaklumi karena Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Sebagai pusat kota maka Denpasar juga berkembang menjadi daerah dengan daya tarik khusus bagi pengembangan perekonomian. Kepadatan penduduk dan perkembangan perekonomian ini menjadi dasar kompleksitas tuntutan hidup di daerah perkotaan sehingga tindak pidana juga seringkali menjadi pilihan sebagai jalan pintas menjawab tuntutan tersebut.

Pada tahun 2013 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan nilai *crime rate* adalah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Sementara tujuh kabupaten lainnya mengalami penurunan nilai.

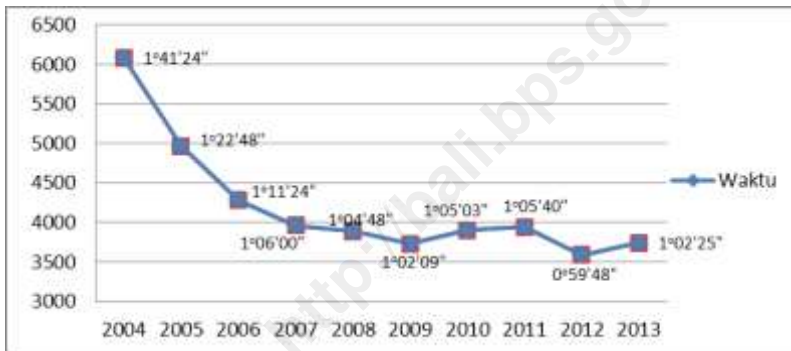
3.3. Selang Waktu Terjadi Tindak Pidana (*Crime Clock*)

Selang waktu merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur interval kejadian tertentu. Kejadian pidana juga bisa dianalisis dengan interval waktu dengan cara membandingkan kejadian pidana yang satu dengan lainnya. Yang bisa dibandingkan dan dijadikan analisis adalah selang waktu kejadian.

Kalau dilihat data series periode tahun 2004-2013 menunjukkan selang waktu terjadinya tindak pidana di Provinsi Bali cenderung semakin kecil (Lihat Gambar 3.4). Dengan kata lain semakin cepat terjadi tindak pidana kalau diukur dengan membandingkan kejadian yang pertama dan kejadian selanjutnya. Hal ini bisa dilihat dari semakin kecilnya nilai *crime clock* yang hanya 1°02'25" (2013) dibandingkan 1°41'24" (2004). Kondisi yang

sedikit menggembirakan adalah terjadinya kecenderungan naiknya selang waktu tindak pidana dari 1°02'09" pada tahun 2009 menjadi 1°05'03" pada tahun 2010 dan meningkat lagi menjadi 1°05'40" pada tahun 2011. Akan tetapi pada tahun 2012 intensitas tindak pidana kembali meningkat yang ditandai dengan semakin kecilnya angka selang waktu terjadinya tindak pidana yaitu menjadi sebesar 0°59'48", bahkan angka ini merupakan terendah selama periode sepuluh tahun terakhir.

Gambar 3.4
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*) Provinsi Bali Tahun 2004-2013



Sumber: Polda Bali, 2004-2013

Kalau dilihat berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2013, Kabupaten Bangli memiliki selang waktu terjadinya tindak pidana paling tinggi dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Artinya selang waktu antar terjadinya tindak pidana satu dengan tindak pidana berikutnya berselang waktu paling lama yakni 32°33'54" (32 jam 33 menit 54 detik). Posisi kedua tertinggi adalah Kabupaten Klungkung yakni 22°00'36" (20 jam 36 detik). Sementara itu, Kota Denpasar memiliki *Crime Clock* paling rendah atau memiliki selang waktu antar terjadinya tindak pidana satu dengan tindak pidana

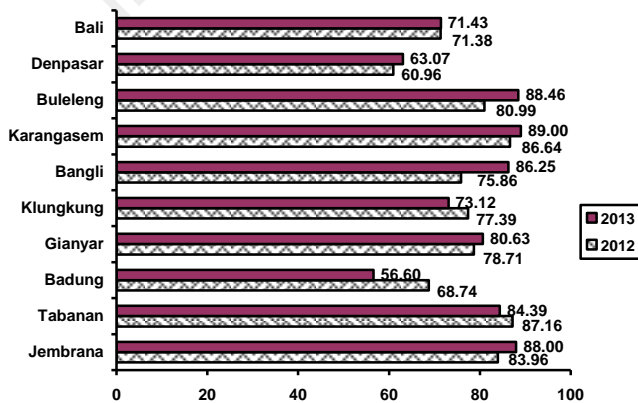
berikutnya paling pendek sebesar 02^o52'13" atau 2 jam 52 menit 13 detik (Lihat Lampiran Tabel 4.).

3.4. Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearence Rate*)

Kualitas sumber daya aparat Kepolisian sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian tindak pidana. Secara internal aparat Polri, masih menghadapi dinamika tata hubungan antar anggota Polri seperti kasus penembakan sesama anggota Polri, keterlibatan dalam tindak kriminal, atau terdeteksinya aspek ketidaklayakan psikologis dalam memegang senjata.

Angka penyelesaian tindak pidana (*clearence rate*) dapat dijadikan sebagai tolok ukur kesigapan aparat dalam menyelesaikan kasus atau tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah. Semakin besar nilai *clearence rate* berarti semakin baik kinerja aparat. Hal ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa aparat terkait siap mendukung ketahanan dan keamanan wilayah suatu daerah.

Gambar 3.5
Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearence Rate*) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2012-2013



Sumber: Polda Bali, 2012-2013

Pada tahun 2013 angka penyelesaian tindak pidana di Provinsi Bali mencapai 71,43 persen. Angka ini tentu sudah relatif menggembirakan karena merupakan angka tertinggi yang dicapai selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Pemerintah khususnya pihak Kepolisian selama ini sudah melakukan upaya untuk meningkatkan angka penyelesaian tindak pidana. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan kemampuan anggota kepolisian dengan menambah jumlah personil dan kualitas personil melalui pendidikan dan pelatihan.

Kalau dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun 2013 hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami kenaikan nilai *clearance rate* jika dibandingkan dengan tahun 2012 (kecuali Kabupaten Tabanan, Badung dan Klungkung). Dari enam kabupaten/kota yang mengalami kenaikan nilai *clearance rate*, Kabupaten Bangli merupakan yang tertinggi yaitu 10,39 poin, sedangkan lima kabupaten/kota yang lain kenaikannya masih dibawah 10 poin. Sementara itu, Kabupaten Badung mengalami penurunan sebesar 12,57 poin, sedangkan Kabupaten Klungkung dan Tabanan masing-masing sebesar 4,27 dan 2,77 poin.

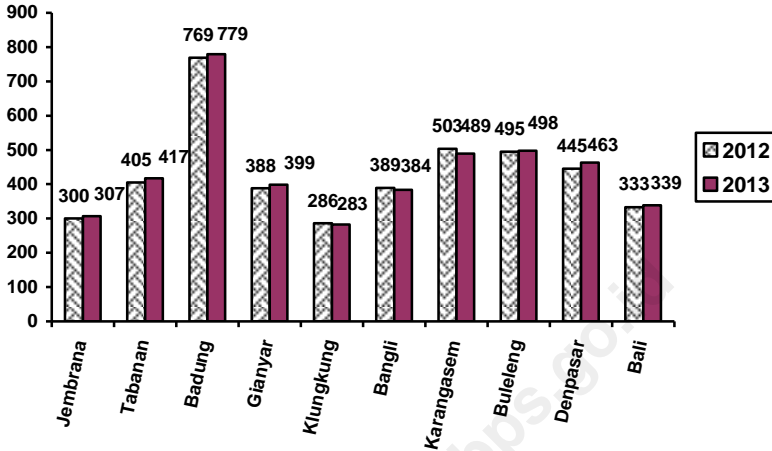
Kondisi yang cukup menggembirakan terjadi pada enam kabupaten yang memiliki nilai *clearance rate* lebih besar dari 80 persen yaitu Kabupaten Jembrana (88,00 persen), Kabupaten Tabanan (84,39 persen), Kabupaten Gianyar (80,63 persen), Kabupaten Bangli (86,25 persen), Kabupaten Karangasem (89,00 persen) dan Kabupaten Buleleng (88,46 persen). Sementara itu, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki *clearance rate* terendah masing-masing 56,60 persen dan 63,07 persen.

3.5. Rasio Penduduk Polri

Dalam tataran ideal maka keberadaan personil Polri berbanding lurus dengan tingkat pelayanan pada masyarakat baik dari sisi keamanan atau pelayanan polisi lainnya. Menurut standar *UN*, rasio Polri penduduk adalah 400 (Panduan Statistik Hansos). Sementara itu, pemerintah setiap tahun selalu mengadakan rekrutment sebagai upaya untuk menambah personil kepolisian. Pada tahun 2009 Kepolisian Republik Indonesia menargetkan rasio penduduk per Polri sebesar 600. Sebagai perbandingan, pada tahun 1999 angka rasio polisi dan penduduk di Brunai Darussalam adalah sebesar 1 : 250, Singapura 1 : 300, Jepang 1 : 400, Filipina 1 : 500, Thailand 1 : 550, India 1 : 700 dan Cina 1 : 900. (<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/04/06/0131.html>).

Pada dua tahun terakhir rasio penduduk per Polri di Provinsi Bali mengalami sedikit kenaikan yaitu dari 333 menjadi 339 (Lihat Gambar 3.6). Rasio penduduk Polri di Provinsi Bali masih memenuhi standar internasional dan secara nasional masih memenuhi nilai yang ditargetkan Polri. Hal ini berarti perkembangan personil Polri di Provinsi Bali masih mampu mengimbangi perkembangan penduduknya.

Gambar 3.6
Rasio Penduduk terhadap Polri,
Provinsi Bali Tahun 2012 - 2013



Sumber: 1. Polda Bali, 2012-2013
 2. Dihitung Berdasarkan Jumlah Penduduk DAU, BPS Provinsi Bali.

Kalau dilihat berdasarkan kabupaten/kota maka ada lima kabupaten/kota yang belum memenuhi standar rasio (masih di atas 400) yaitu Kabupaten Tabanan, Badung, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar. Sementara itu, dengan empat kabupaten/kota lainnya sudah mencapai kriteria ideal standar UN (dibawah 400). Jika dibandingkan antara tahun 2012 dengan 2013, hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami kenaikan rasio yang bervariasi kecuali Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem. Kenaikan rasio yang paling tinggi terjadi di Kota Denpasar yaitu sebesar 18.

Kabupaten Badung masih jauh melampaui standar yang ditetapkan. Hal ini bisa dipahami karena wilayah kerja Kepolisian Resort Badung tidak sama dengan wilayah administratifnya, sehingga anggota kepolisian di 3 sektor tidak tercatat di Polres

Badung tetapi tercatat di Polresta Denpasar. Ketiga sektor tersebut adalah Polsek Kuta Selatan, Polsek Kuta, dan Polsek Kuta Utara.

3.6. Persentase Tindak Pidana Menurut Jenis Tindak Pidana

Kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan dan kejahatan susila yang merupakan karakteristik cerminan kondisi perekonomian, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Menghadapi suatu permasalahan ringan apabila disertai dengan emosi yang tinggi dapat berubah menjadi tindak kriminal yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sementara itu, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum menyebabkan kepatuhan masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak pidana masih rendah. Akibatnya tindak kriminalitas yang terjadi secara statistik lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di masyarakat.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia, perdagangan anak-anak dan perempuan, ataupun perdagangan narkoba semakin kompleks dan semakin tinggi intensitasnya. Letak geografis yang strategis pada persimpangan dua benua dan dua samudera, menyebabkan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat terlibat aktif dalam permasalahan kejahatan transnasional. Masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerjasama internasional di bidang kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Provinsi Bali sebagai salah satu pintu

masuk utama kedatangan wisatawan mancanegara tidak luput dari kompleksitas permasalahan kejahatan transnasional.

Berdasarkan pengelompokan tindak pidana menurut jenisnya, ada sepuluh jenis tindak pidana yaitu pencurian dengan pemberatan, penipuan, pencurian biasa, penggelapan, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyalahgunaan narkoba, permainan judi, pencurian dengan kekerasan dan lainnya. Pengelompokan ini tidak mutlak, tetapi disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan perencanaan.

Berdasarkan Gambar 3.7, pada tahun 2013 dari sembilan kelompok pertama, pencurian dengan pemberatan menjadi tindak pidana dengan persentase tertinggi di Bali (8,25 persen), kemudian disusul pencurian biasa (6,71 persen), permainan judi (5,34 persen), penggelapan (5,08 persen), dan penipuan (4,69 persen).

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan transnasional, di Provinsi Bali kondisinya masih cukup mengkhawatirkan yaitu sebanyak 319 kasus atau 3,79 persen dari total kasus tindak pidana. Oleh karena itu pencegahan dan penindakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu prioritas sasaran pembangunan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas. Narkoba merupakan tindak kriminal yang perlu diwaspadai karena efek berantai lintas generasi yang sangat membahayakan dan pada umumnya pengguna narkoba merupakan golongan pemuda baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Hasil keseriusan Polda Bali dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah tampak. Selama periode tahun 2011-2013, tindak pidana penyalahgunaan narkoba tercatat selalu mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 4,71 persen, 4,18 persen, dan 3,79 persen.

Gambar 3.7
Persentase Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar
Provinsi Bali Tahun 2013



Sumber: Polda Bali, 2013.

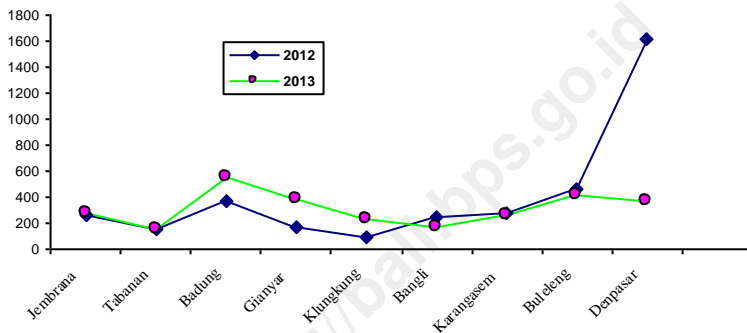
Disamping itu pola perkembangan tindak kriminal lainnya juga harus menjadi perhatian mengingat pola ini sangat erat hubungannya dengan berbagai aspek sosial yang berkembang di masyarakat. Kesalahan dalam merencanakan dan mencermati perkembangan ini akan sangat berbahaya bagi ketahanan sosial dan wilayah Provinsi Bali khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) umumnya.

3.7. Pelaku Tindak Pidana

Statistik pelaku tindak pidana dikelompokkan menurut jenis kelamin, umur, dan kewarganegaraan. Pola dinamika jumlah pelaku tindak pidana yang dilaporkan oleh masing-masing Polres/Polresta dengan jumlah tindak pidana yang dilaporkan ternyata tidak seragam. Pada periode tahun 2012-2013, di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar, dan Klungkung mempunyai pola jumlah tindak pidana meningkat tetapi jumlah pelaku tindak pidana menurun.

Sementara itu Kota Denpasar mempunyai pola dinamika sebaliknya. Pada periode 2012-2013, di Kabupaten Bangli, Karangasem, dan Buleleng mempunyai pola penurunan baik dari jumlah pelaku maupun jumlah kejadian tindak pidana yang dilaporkan. Sementara itu di Kabupaten Badung mempunyai pola dinamika peningkatan di dua indikator tersebut.

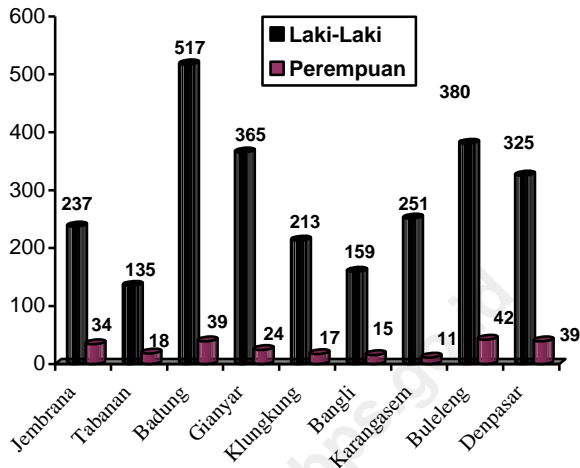
Gambar 3.8
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Bali Tahun 2012-2013



Sumber: Polres/Polresta se-Bali 2012-2013.

Berdasarkan Gambar 3.8. dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 jumlah pelaku tindak pidana di lima kabupaten/kota mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, dan Klungkung. Persentase peningkatan jumlah pelaku tindak pidana tertinggi terjadi di Kabupaten Klungkung disusul kemudian Kabupaten Gianyar, Badung, Jembrana, dan Kabupaten Tabanan masing-masing sebesar 161,36 persen, 134,34 persen, 52,75 persen, 6,69 persen dan 4,08 persen. Sementara itu, Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, Buleleng, dan Karangasem mengalami penurunan masing-masing sebesar 77,56 persen, 27,5 persen, 9,05 persen dan 6,76 persen.

Gambar 3.9
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kelamin Tahun 2013



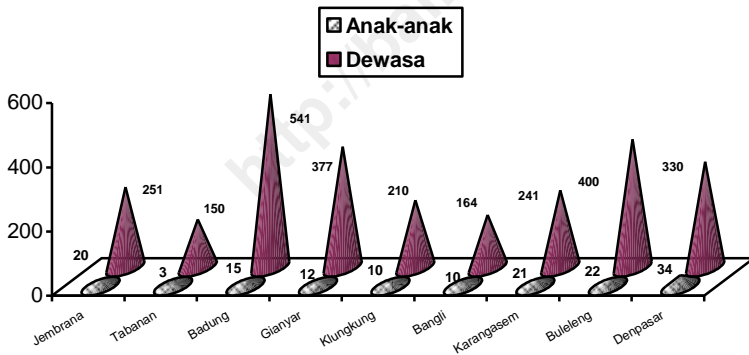
Sumber: Polres/Polresta se-Bali 2013

Sejalan dengan pendapat para kriminolog yang menyebutkan bahwa dunia kriminalitas adalah dunia laki-laki, sebagian besar pelaku tindak pidana adalah laki-laki. Gambar 3.9 menunjukkan bahwa di seluruh kabupaten/kota pelaku tindak pidana didominasi laki-laki. Persentase perempuan pelaku tindak pidana tertinggi terjadi di Kabupaten Jembrana sebesar 12,54 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Karangasem sebesar 4,20 persen dari total pelaku masing-masing kabupaten/kota.

Pelaku tindak pidana menurut kabupaten/kota dan komposisi kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 3.10. Berdasarkan komposisi umur, pelaku tindak pidana di Bali pada tahun 2013 pada seluruh kabupaten/kota didominasi oleh kelompok umur dewasa. Pada tahun 2012, persentase anak-anak terlibat kasus tindak pidana tertinggi terjadi di Kabupaten Bangli

disusul kemudian Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng masing-masing sebesar 10,83 persen, 6,69 persen, dan 5,82 persen terhadap total pelaku di masing-masing kabupaten/kota. Sementara itu pada tahun 2013 tiga kabupaten/kota dengan persentase anak-anak terlibat kasus tindak pidana tertinggi adalah Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Jembrana, dengan persentase masing-masing sebesar 9,34 persen, 8,01 persen, dan 7,38 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang persentase anak-anak terlibat kasus tindak pidana terendah adalah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar, dengan persentase masing-masing sebesar 1,96 persen, 2,70 persen, dan 3,08 persen dari total pelaku tiap kabupaten/kota.

Gambar 3.10
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota dan
Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2013

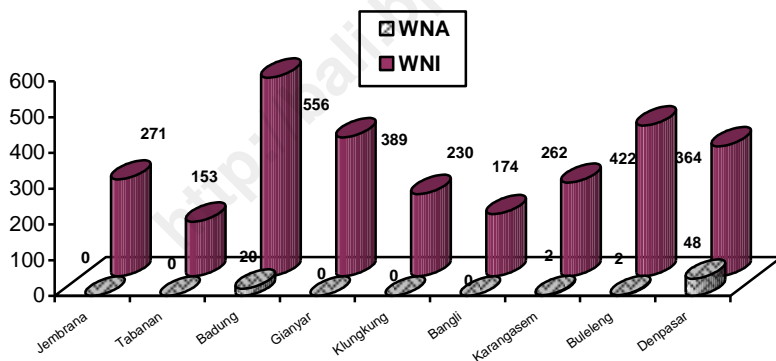


Sumber: Polres/Polresta se-Bali 2013

Gambar 3.11. menunjukkan jumlah pelaku tindak pidana menurut kabupaten/kota dan kewarganegaraan. Sebagian besar tindak pidana di Bali dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI)

dan sangat kecil yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Pada tahun 2013 ada lima kabupaten yang tidak ada seorangpun WNA yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Kelima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli. Persentase WNA yang menjadi pelaku tindak pidana tertinggi terjadi di Kota Denpasar disusul kemudian Kabupaten Badung, masing-masing sebesar 13,19 persen (48 orang), dan 3,60 persen (20 orang) dari total pelaku di tiap kabupaten/kota. Sedangkan dua kabupaten yang lainnya masih di bawah 1 persen.

Gambar 3.11
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kewarganegaraan dan Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2013



Sumber: Polres/Polresta se-Bali 2013.

<http://bali.bps.go.id>

BAB IV

PENUTUP

Jumlah tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah dapat dipakai untuk melihat gambaran umum tingkat keamanan di wilayah tersebut. Secara umum berdasarkan data dan kajian indikator kriminalitas Provinsi Bali 2004-2013 menunjukkan tendensi adanya peningkatan kejadian tindak pidana, kecuali tahun 2010. Sementara itu, pada tahun 2013 juga terjadi penurunan jumlah tindak pidana dibandingkan tahun sebelumnya. Penanganan keamanan harus dilakukan secara menyeluruh yang tidak saja tergantung pada aparat terkait semata tetapi juga menuntut kesadaran seluruh komponen masyarakat.

Secara umum rasio Polri terhadap jumlah penduduk di Provinsi Bali sudah memenuhi standar yang ditetapkan PBB yaitu dibawah 400, walaupun di beberapa kabupaten/kota rasionya masih belum memadai atau belum memenuhi standar ideal.

Peluang penduduk mengalami risiko tindak pidana menunjukkan dinamika yang tidak stabil. Pada periode 2009-2011 terjadi penurunan, tetapi mengalami kenaikan pada periode tahun 2011-2012. Pada periode tahun 2012-2013 risiko penduduk terkena tindak pidana kembali mengalami penurunan. Demikian juga interval kejadian pidana (*crime clock*) pada periode tahun 2011-2012 cenderung semakin pendek.

Kompleksitas modus pidana pada tahun 2013 belum menunjukkan pergeseran dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan persentase tindak pidana masih berkisar pada

tindak pidana konvensional. Tindak pidana yang umum terjadi di Bali adalah pencurian dan perjudian. Pemerintah Provinsi Bali terus berkomitmen untuk gencar mensosialisasikan ketegasan aparat dalam penindakan pidana narkoba, hal ini sedikit membuahkan hasil dimana tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada periode tahun 2009-2013 terus mengalami penurunan dari segi jumlah.

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi perlu diwaspadai karena pola tindak pidana yang terjadi sekarang ini telah berkembang ke bentuk tindak pidana dengan modus operandi yang beragam dan menonjol dengan menggunakan perkembangan teknologi seperti pembobolan rekening bank. Aparat terkait perlu mengantisipasi tindak kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kemajuan teknologi tersebut.

Berdasarkan data dan kajian kriminal dalam publikasi ini, maka masih perlu adanya upaya-upaya yang perlu dilakukan melalui program pembangunan aparat terkait dengan menumbuhkan kesadaran dan membangkitkan modal sosial yang berkembang di masyarakat. ke depan dengan mengandalkan upaya penanggulangan tindak pidana dengan metode konvensional harus dikombinasikan dengan terobosan yang lebih banyak memberikan peran pada swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah. Lebih penting lagi menumbuhkan tanggung jawab bersama bahwa masalah kriminal berawal dari masyarakat, ada, tumbuh dan berkembang di masyarakat dan sumber penyelesaiannya pun ada di sumber masalahnya.

LAMPIRAN

<http://balipdf.go.id>

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*), Provinsi Bali Tahun 2004-2013

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 .	Jembrana	115	432	508	432	444	465	1.173	555	555	500
2 .	Tabanan	302	339	543	481	483	480	408	413	553	442
3 .	Badung	-	346	399	398	429	594	667	644	627	788
4 .	Gianyar	395	640	800	855	878	851	562	816	897	795
5 .	Klungkung	123	195	275	384	347	392	255	298	429	398
6 .	Bangli	98	164	254	248	240	220	212	226	290	269
7 .	Karangasem	240	297	367	339	427	449	452	471	449	409
8 .	Buleleng	966	1.182	1.501	1.497	1.224	1.094	858	1.158	1.315	927
9 .	Denpasar	2.505	2.434	2.586	2.664	2.917	3.194	2.420	2.812	2.851	3.052
10.	Polda	416	507	551	644	732	719	1.072	735	824	840
Jumlah		5.160	6.536	7.784	7.942	8.121	8.458	8.079	8.128	8.790	8.420

Sumber : Polda Bali

Catatan : Data series tergantung ketersediaan data

Tabel 2. Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Provinsi Bali, Tahun 2004-2013

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Jembrana	99	210	491	365	389	388	859	434	466	440
2.	Tabanan	219	272	482	450	438	366	345	416	482	373
3.	Badung	-	160	224	243	228	366	465	409	431	446
4.	Gianyar	319	483	567	574	579	577	462	623	706	641
5.	Klungkung	84	133	183	283	245	253	190	179	332	291
6.	Bangli	61	127	182	190	161	172	185	188	220	232
7.	Karangasem	162	196	324	279	367	379	361	361	389	364
8.	Buleleng	650	815	1.148	1.108	927	822	683	862	1.065	820
9.	Denpasar	1.232	1.265	1.625	1.646	1.752	1.817	1.453	1.654	1.738	1.925
10.	Polda	171	234	324	444	386	491	571	417	445	482
	Jumlah	2.997	3.895	5.550	5.582	5.472	5.631	5.574	5.543	6.274	6.014

Sumber : Polda Bali

Catatan : Data series tergantung ketersediaan data

Tabel 3. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Provinsi Bali Tahun 2004-2013

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Jembrana	45,57	174,45	202,54	170,08	167,63	179,89	448,33	207,83	206,41	184,23
2.	Tabanan	74,45	84,84	134,32	117,62	116,60	115,59	96,93	96,13	127,89	101,34
3.	Badung	-	88,82	100,06	97,52	113,65	140,02	122,76	116,13	108,43	131,06
4.	Gianyar	93,16	151,83	187,24	197,46	224,73	192,84	119,63	170,18	183,86	160,62
5.	Klungkung	74,67	119,51	166,94	230,92	197,80	233,29	149,52	171,19	245,07	225,80
6.	Bangli	46,52	78,57	119,95	115,46	112,94	100,31	98,44	102,82	131,12	120,67
7.	Karangasem	60,36	78,76	96,50	88,40	99,83	116,02	114,00	116,39	110,32	99,79
8.	Buleleng	158,25	196,56	246,03	241,90	190,28	173,10	137,47	181,78	205,10	143,36
9.	Denpasar	483,59	423,34	443,11	449,78	625,07	646,38	306,88	349,36	341,49	353,45
	Jumlah	151,89	193,17	226,83	228,23	240,77	238,19	207,65	204,67	217,22	204,22

Sumber : Polda Bali

Catatan : Data series tergantung ketersediaan data

Tabel 4. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*) Provinsi Bali Tahun 2004-2013

No.	Kabupaten/ Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(11)	(12)
1.	Jembrana	76°10'12"	20°16'12"	17°14'24"	20°16'22"	19°43'48"	18°50'19"	07°28'05"	16°47'02"	15°47'12"	17°31'12"
2.	Tabanan	29°00'00"	25°50'24"	16°7'48"	18°12'36"	18°8'24"	18°15'00"	21°28'14"	21°12'38"	15°50'27"	19°49'08"
3.	Badung	-	25°06'00"	21°57'00"	22°06'00"	20°25'12"	14°54'51"	13°08'00"	14°36'09"	13°58'17"	11°07'00"
4.	Gianyar	22°10'12"	13°40'48"	10°57'00"	10°14'24"	9°58'48"	10°17'38"	15°35'14"	11°44'07"	09°45'57"	11°01'08"
5.	Klungkung	71°12'36"	44°55'12"	31°51'00"	22°48'36"	25°14'24"	22°20'49"	34°21'11"	29°23'46"	20°25'10"	22°00'36"
6.	Bangli	89°22'48"	53°24'36"	34°29'24"	35°19'12"	36°30'00"	39°49'05"	41°19'15"	39°45'40"	30°12'25"	32°33'54"
7.	Karangasem	36°30'00"	29°29'24"	23°52'12"	25°50'24"	20°31'12"	19°30'36"	19°22'50"	19°35'55"	19°30'36"	21°25'05"
8.	Buleleng	9°36'00"	7°24'36"	5°50'24"	5°51'36"	7°9'36"	08°00'26"	10°12'35"	08°33'53"	06°39'42"	09°26'59"
9.	Denpasar	19°00'00"	3°35'24"	3°23'24"	3°16'48"	03°0'00"	02°44'34"	03°37'11"	03°06'55"	03°04'21"	02°52'13"
10.	Polda	19°00'00"	17°16'12"	15°54'00"	13°36'00"	11°57'36"	12°11'01"	08°10'18"	12°55'06"	10°37'52"	10°25'43"
	Jumlah	01°41'24"	01°22'48"	01°11'24"	01°06'00"	01°04'48"	01°02'09"	01°05'03"	01°05'40"	00°59'48"	01°02'25"

Sumber : Polda Bali

Catatan : Data series tergantung ketersediaan data

Tabel 5. Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearence Rate*) Provinsi Bali Tahun 2004-2013

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Jembrana	86,09	48,61	96,65	84,49	87,61	83,44	73,23	78,20	83,96	88,00
2.	Tabanan	72,52	80,24	88,77	93,56	90,68	76,25	84,56	100,73	87,16	84,39
3.	Badung	-	46,24	56,14	61,06	53,15	61,62	69,72	63,51	68,74	56,60
4.	Gianyar	80,76	75,47	70,88	67,13	65,95	67,80	82,21	76,35	78,71	80,63
5.	Klungkung	68,29	68,21	66,55	73,70	70,61	64,54	74,51	60,07	77,39	73,12
6.	Bangli	62,24	77,44	71,65	76,61	67,08	78,18	87,26	83,19	75,86	86,25
7.	Karangasem	67,50	65,99	88,28	82,30	85,95	84,41	79,87	76,65	86,64	89,00
8.	Buleleng	67,29	68,95	76,48	74,01	75,74	75,14	79,60	74,44	80,99	88,46
9.	Denpasar	49,18	51,97	62,84	61,79	60,06	56,89	60,04	58,82	60,96	63,07
10.	Polda	41,11	46,15	58,80	68,94	52,73	68,29	53,26	56,73	54,00	57,38
	Jumlah	58,58	59,59	71,30	70,28	67,38	66,58	68,99	68,20	71,38	71,43

Sumber : Polda Bali

Catatan : Data series tergantung ketersediaan data

Tabel 6. Jumlah Polri dan Rasio Penduduk per Polri Provinsi Bali Tahun 2011 - 2013

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Polri 2011			Rasio Penduduk per Polri	Jumlah Polri 2011			Rasio Penduduk per Polri ri	Jumlah Polri 2013			Rasio Penduduk per Polri
		Laki-laki	Perempuan	Total		Laki-laki	Perempuan	Total		Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1 .	Jembrana	848	21	869	307	878	17	895	300	868	17	885	307
2 .	Tabanan	1.047	40	1.087	395	1.028	40	1.068	405	1.010	37	1.047	417
3 .	Badung	731	34	765	725	720	32	752	769	742	30	772	779
4 .	Gianyar	1.237	34	1.271	377	1.222	36	1.258	388	1.206	34	1.240	399
5 .	Klungkung	588	12	600	290	600	13	613	286	608	14	622	283
6 .	Bangli	560	9	569	386	559	10	569	389	570	10	580	384
7 .	Karangasem	784	15	799	506	793	16	809	503	823	16	839	489
8 .	Buleleng	1.279	27	1.306	488	1.269	25	1.294	495	1.276	22	1.298	498
9 .	Denpasar	1.813	111	1.924	418	1.768	107	1.875	445	1.760	104	1.864	463
10 .	Polda	2.654	236	2.890		2.771	258	3.029		2.767	251	3.018	
	Jumlah	11.541	539	12.080	329	11.608	554	12.162	333	11.630	535	12.165	339

Sumber : Polda Bali

Tabel 7. Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar Provinsi Bali Tahun 2010-2013

No.	Jenis Tindak Pidana *)	2009			2010			2012			2013		
		Jumlh	Persen-tase	Peringkat	Jumlh	Persen-tase	Peringkat	Jumlh	Persen-tase	Peringkat	Jumh	Persen-tase	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pencurian dengan pemberatan	821	12,40	2	816	10,04	2	637	7,25	3	695	8,25	2
2	Penipuan	453	6,84	6	412	5,07	6	260	2,96	7	395	4,69	6
3	Pencurian biasa	693	10,46	4	666	8,19	4	532	6,05	4	565	6,71	3
4	Penggelapan	459	6,93	5	521	6,41	5	425	4,84	5	428	5,08	5
5	Penganiayaan Ringan	189	2,85	8	80	0,98	9	148	1,68	8	216	2,57	8
6	Penganiayaan Berat	26	0,39	10	16	0,20	10	7	0,08	10	4	0,05	10
7	Narkotika	312	4,71	7	340	4,18	7	332	3,78	6	319	3,79	7
8	Permainan Judi	803	12,12	3	723	8,90	3	699	7,95	2	450	5,34	4
9	Pencurian dengan kekerasan	135	2,04	9	89	1,09	8	67	0,76	9	59	0,70	9
10	Lain-lain	2.732	41,25	1	4.465	54,93	1	5.683	64,65	1	5.684	62,81	1
	Jumlah	6.623	100,00		8.128	100,00		8.790	100,00		8.420	100,00	

Sumber : Polda Bali

Tabel 8. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten Dan Karakteristik Demografis Tahun 2012-2013

berlanjut...

No.	Kabupaten/Kota*)	Jenis Kelamin						Kategori Umur					
		2012			2013			2012			2013		
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Dewasa	Anak-Anak	Total	Dewasa	Anak-Anak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Jembrana	197	57	254	237	34	271	237	17	254	251	20	271
2	Tabanan	137	10	147	135	18	153	140	7	147	150	3	153
3	Badung	346	18	364	517	39	556	351	13	364	541	15	556
4	Gianyar	154	12	166	365	24	389	162	4	166	377	12	389
5	Klungkung	77	11	88	213	17	230	85	3	88	210	10	230
6	Bangli	220	20	240	159	15	174	214	26	240	164	10	174
7	Karangasem	260	21	281	251	11	262	278	3	281	241	21	262
8	Buleleng	428	36	464	380	42	422	437	27	464	400	22	422
9	Denpasar	1411	211	1 618	325	39	364	1620	2	1622	330	34	364
	Polda Bali**)	873	214	1 087	880	84	964	911	96	1 087	964	0	964

Sumber : 1. *) Masing-Masing Polres se-Bali

2. **) Polda Bali

Tabel 8. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten Dan Karakteristik Demografis Tahun 2012-2013

...lanjutan

No.	Kabupaten/Kota*)	Kewarganegaraan					
		2012			2013		
		WNI	WNA	Total	WNI	WNA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jembrana	254	0	254	271	0	271
2	Tabanan	147	0	147	153	0	153
3	Badung	341	23	364	536	20	556
4	Gianyar	165	1	166	389	0	389
5	Klungkung	85	3	88	230	0	230
6	Bangli	240	0	240	174	0	174
7	Karangasem	277	4	281	260	2	262
8	Buleleng	462	2	464	420	2	422
9	Denpasar	1 618	4	1 622	316	48	364
	Bali**)	1 042	45	1 087	930	34	964

Sumber : 1. *) Masing-Masing Polres se-Bali

2. **) Polda Bali

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226

Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162

Homepage: <http://bali.bps.go.id>

E-mail: bps5100@bps.go.id

